

PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 KUHP

Oleh : HOWARD JULIO TIGRIS

ABSTRAK

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menegaskan kewajiban kepada notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terdapat notaris yang melakukan tindak pidana turut serta pemalsuan akta otentik. Untuk itu maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat dan pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus yang diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan yaitu menurut UUJN dapat diterapkan tentang pemecatan jabatan/Notaris diberhentikan dari jabatannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdara wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan dan menurut Pasal 264 dan 266 KUHP berupa pidana penjara. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta atas indikasi turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pemalsuan pembuatan akta dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana berupa hukuman penjara dan sanksi administratif yang bersifat pidana.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Turut Serta, Pemalsuan

THE ROLE OF A NOTARY AS A DEED MAKING OFFICIAL ASSOCIATED WITH ARTICLE 55 OF THE KUHP

By : HOWARD JULIO TIGRIS

ABSTRACT

Article 16 Paragraph (1) Letter a Law Number 2 of 2014 Concerning the Office of a Notary Public which emphasizes the obligation of a notary to act in a trustful, honest, thorough, independent, impartial manner and protect the interests of the parties involved in legal actions. However, in practice there are still notaries who commit criminal acts involving the forgery of authentic deeds. For this reason, the purpose of this study is to analyze the legal consequences and responsibilities of a notary in his position as a deed making official in making an authentic deed which indicates the participation of the criminal act of forgery. The method used in this research is normative juridical research with statutory, conceptual, analytical and case approaches which are processed using qualitative descriptive techniques. The results of the study show that the legal consequences for a notary in his position as a deed-making official in making authentic deeds indicated that there was an indication of participation in the criminal act of forgery, namely according to the UUJN it can be applied regarding dismissal/notary being dismissed from his position, according to Article 1365 of the Civil Code he is obliged to pay compensation to the aggrieved parties and according to Articles 264 and 266 of the Criminal Code in the form of imprisonment. The legal responsibility of a notary in his position as an official making a deed for indications of participating in the crime of forgery in making an authentic deed, that is, he can be criminally responsible if he fulfills the elements of error, namely being able to take responsibility, there is an inner relationship in the form of intentionality and there is no reason to erase the mistake. So that a Notary who consciously deliberately or is involved in falsifying the making of a deed can be held accountable in criminal law in the form of imprisonment and criminal administrative sanctions.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Participation, Forgery